

Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik

by UPM turnitin

Submission date: 27-Feb-2024 07:11PM (UTC+0700)

Submission ID: 2305920941

File name: BOOK_CHAPTER_TEKNIK_AKUNTANSI_SEKTOR_PUBLIK_UMI_RAHMA_DHANY.docx (527.88K)

Word count: 3557

Character count: 23531

Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Umi Rahma Dhany, S.Pd., M.Pd.

Universitas Panca Marga Probolinggo

5.1 PENDAHULUAN.

Ilmu Akuntansi ada untuk memberikan pertanggungjawaban dan akuntabilitas suatu badan usaha atas pengelolaan operasi usahanya terhadap stakeholder atau pihak yang memiliki kepentingan. Akuntansi merupakan sebuah proses mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, memproses, dan menganalisa kejadian atau peristiwa ekonomi yang kemudian membentuk laporan yang berguna dalam pengambilan keputusan. Begitu pula pada entitas sektor publik, kehadiran akuntansi dapat membantu sektor publik mencapai tujuannya.

10

Mardiasmo (2018) akuntansi entitas publik merupakan suatu alat informasi sebagai penyedia informasi akuntabilitas dan pengendalian manajemen bagi pemerintah maupun publik. Akuntansi entitas publik adalah suatu bidang ilmu dalam akuntansi. Secara garis besar teknik penerapan akuntansi pada entitas sektor publik sama dengan metode dalam akuntansi keuangan entitas swasta yaitu terdiri dari 3 hal pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. Namun demikian teknik ini perlu dibahas secara khusus untuk entitas sektor publik karena memiliki karakteristik yang berbeda dari sektor swasta. Tujuan umum dalam penyajian akuntansi oleh pemerintah adalah memberikan informasi untuk pengambilan keputusan bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Sistem akuntansi yang bermutu akan mengandung prinsip *stewardship* (pengelolaan) dan *accountability* (pertanggungjawaban) yang baik.

Penyusunan laporan keuangan sektor publik yang baik tidak lepas dari hambatan-hambatan yang ada, yaitu:

1. Objektivitas. Merupakan kendala utama dalam menciptakan laporan keuangan yang signifikan untuk disampaikan kepihak eksternal (stakeholder) suatu entitas.
2. Konsistensi. Laporan keuangan suatu entitas usaha harus memakai metode akuntansi yang sama.
3. Daya Banding. Laporan keuangan entitas publik harus memiliki daya banding dengan entitas sejenis tentang kinerja usahanya.
4. Tepat Waktu. Laporan keuangan harus dilaporkan secara akurat pada akhir waktu periodenya supaya dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan bidang ekonomi, sosial, dan politik.

5. Ekonomis dalam Pelaporan Akuntansi. Penyajian laporan keuangan entitas publik harus dilaporkan dengan biaya yang rendah dan itu merupakan hambatan yang harus ditangani karena semakin banyak informasi yang dibutuhkan maka semakin besar biaya yang dikeluarkan.
6. Materialitas. Sebuah laporan keuangan harus mengandung prinsip material yang artinya dengan penyajian laporan dapat membantu suatu pengambilan keputusan.

31

5.2 STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.

Standar akuntansi adalah pedoman atau dasar dasar untuk pembuatan dan pelaporan informasi keuangan entitas publik atau pemerintah dengan tujuan memberikan informasi pada para pengguna laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan banyak diperlukan dalam bentuk menjaga konsistensi dalam pelaporan keuangan sehingga terjamin transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi sektor publik.

Terdapat beberapa kondisi yang harus dipikirkan dalam penetapan standar akuntansi yaitu:

1. Standar memberikan dasar penjelasan yang harus ditampilkan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, maupun aktivitas sebuah entitas bagi seluruh pihak pihak yang berkepentingan.
2. Standar menyampaikan beberapa petunjuk dan dasar aktivitas bagi auditor yang mengharuskan melakukan pengujian secara akurat dan mandiri saat memakai keahlian dan kredibilitasnya saat memeriksa laporan suatu entitas serta saat memverifikasi kewajarannya.
3. Standar memberikan informasi mengenai beberapa data yang perlu dilaporkan terkait berbagai variabel yang wajib direkomendasikan dalam aspek perpajakan, peraturan, perencanaan serta peraturan ekonomi dan pengembangan kemampuan ekonomi serta sasaran yang berkaitan dengan kegiatan sosial lainnya.

Standar Akuntansi entitas Publik diatur dalam PP Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditegaskan dalam 8 pasal. SAP dijabarkan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP).

Pernyataan tersebut harus digunakan oleh lembaga pemerintahan sebagai pedoman dalam pembuatan laporan keuangan. Ada 2 dasar penerapan akuntansi sektor publik yaitu:

1. SAP berbasis AkruaL.

SAP berbasis akrual, adalah SAP yang memandang penerimaan, beban, aktiva, kewajiban dan ekuitas dalam laporan akuntansi berbasis akrual, juga menyetujui bahwa penerimaan, belanja, dan pengeluaran biaya dalam implementasi penarikan anggaran sesuai dengan dasar yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Dasar akrual bagi laporan posisi keuangan menyatakan bahwa aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana ditetapkan dan ditulis pada saat terjadinya transaksi atau saat kondisi

lingkungan berdampak pada kondisi finansial pemerintah, serta tidak memandang saat kas atau setoran kas diterima atau dibayar. SAP dengan dasar akrual bisa digunakan dalam lingkungan pemerintah pusat, daerah dan satuan entitas di lingkungan pusat/daerah.

2. SAP berbasis Kas.

Dasar akuntansi yang dipakai pada laporan akuntansi entitas publik yaitu menggunakan dasar kas dalam penetapan pendapatan, belanja, serta pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran dan menggunakan dasar akrual untuk mengakui aktiva, kewajiban dan ekuitas dalam Laporan Posisi Keuangan. Dasar kas yang digunakan pada Laporan Realisasi Anggaran menyatakan bahwa penerimaan/pendapatan diperhitungkan pada saat kas masuk di Rekening Kas Umum Negara/ Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diperhitungkan pada saat kas dibelanjakan dari rekening kas umum Negara/daerah.

5.3 TEKNIK PENYUSUNAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Menurut (Yuesti dkk, 2020: 36) penyusunan laporan akuntansi sektor publik memiliki beberapa teknik yang dapat diadopsi, antara lain:

1. Akuntansi Dana.
2. Akuntansi Anggaran.
3. Akuntansi Komitmen.
4. Akuntansi Akrual
5. Akuntansi Kas.

Berdasarkan dari teknik penyusunan akuntansi tersebut diatas, tidak berbentuk *mutually exclusive*. Artinya, dapat memilih salah satu dari pemakaian teknik akuntansi. Jadi, suatu entitas publik bisa memakai metode akuntansi yang berbeda, atau dapat memakai teknik-teknik tersebut secara bersama-sama. Akuntansi komitmen, akuntansi kas, dan akuntansi akrual memiliki teknik yang tidak sama karena terdapat perbedaan saat mengakui pendapatan dan biaya. Contohnya pada saat mengakui pendapatan, metode pencatatannya berdampak terhadap dua hal, yaitu pada saat pengiriman barang dan faktur diterbitkan, dan juga saat terjadi pengiriman barang dan faktur dibayar.

5.7 AKUNTANSI DANA.

Teori akuntansi dan untuk tujuan bisnis untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Vetter (Gardiasmo, 2009: 152). Berdasarkan teori tersebut lalu dikembangkan lagi menjadi akuntansi dana yang diadopsi oleh organisasi non profit dan mempunyai arti dana kas. Pengertian dana mencakup (Sabeni dan Ghazali, 2008;10):

1. Kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi yang berdiri sendiri;
2. Terdapat sekumpulan rekening untuk mencatat mutasi kas dan/atau sumber-sumber lainnya yang bersifat saling berimbang;

3. Mempunyai tujuan penggunaan tertentu;

4. Ada ketentuan regulasi mengenai aturan undang - undang yang mengelola mengenai penyusunan dana dan pemakaiannya serta pembatas-pembatasnya.

Teori sumber daya keuangan menyebutkan bahwa dana yang disediakan oleh entitas nirlaba atau institusi pemerintah memiliki keterbatasan penggunaan. Terdapat dua macam dana yang bisa digunakan oleh suatu organisasi nonprofit, adalah sebagai berikut:

1. Dana yang bisa dibelanjakan (expendable fund): dipakai pada saat mencatat jumlah aset, utang, perubahan aset neto, dan sisa dana yang masih bisa dibelanjakan untuk aktivitas yang tidak mempunyai tujuan mencari laba. Model akuntansi dana ini dipakai oleh entitas pemerintahan (Mardiasmo, 2009: 153). Menurut (Nordiawan, 2009) dana yang bisa dibelanjakan yaitu dana yang disiapkan untuk membiayai kegiatan yang bersifat *non- profit oriented* yang merupakan bagian dari tujuan entitas sektor publik. Dana ini berasal dari pajak yang ditarik oleh pemerintah, bea ataupun sumber yang lainnya untuk membiayai jenis kegiatan yang memiliki sifat non bisnis. Contoh pengeluaran dari dana ini adalah penanggulangan bencana alam.

2. Dana yang tidak bisa dibelanjakan (nonexpendable fund): pendapatan, biaya, aset, utang, dan modal dicatat untuk aktivitas dengan tujuan mencari laba. Model dana ini biasanya digunakan pada organisasi bisnis (proprietary funds) (Mardiasmo, 2009: 153). Sedangkan menurut (Nordiawan, 2009) dana yang tidak bisa dibelanjakan adalah dana yang telah dipisahkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat mencari laba. Dana ini memiliki nama lain yaitu *revolving fund* karena fungsi dari pemerintah hanya memiliki peran serta dalam dana awal yang diharapkan dana tersebut berputar melalui pembayaran – pembayaran. Misalnya kegiatan penyediaan air bersih oleh entitas publik Perusahaan Air Minum Daerah.

Sedangkan sumber daya memiliki beberapa bentuk, antara lain yaitu:

1. UNRESTRICTED (SUMBER DAYA YANG TIDAK TERIKAT).

Sumber daya yang pemakaiannya tidak memiliki batasan dan digunakan untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.

2. RESTRICTED (SUMBER DAYA TERIKAT).

Sumber daya yang memiliki batasan dalam pemakaiannya, antara lain yaitu: **Permanently Restricted (Pembatasan Permanen)**. Sumber daya terikat ini yang telah ditunjuk oleh penyumbang untuk tetap dipertahankan secara konstan. OSP bisa menggunakan beberapa atau keseluruhan pendapatan ataupun manfaat ekonomi lainnya yang bermuasal dari sumber daya tersebut. **Temporarily Restricted (Pembatasan Temporer)**. Penetapan pembatasan dari penyumbang supaya tetap dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.

Secara garis besar sangat umum jika secara keseluruhan dana yang dipunyai oleh organisasi sektor publik memiliki tujuan (purpose) tersendiri dalam penggunaannya, baik karena faktor eksternal (external restriction), faktor internal (management planning), maupun karena peraturan tertentu. Dalam sistem akuntansinya kemudian pemasukan yang dimiliki entitas sektor publik dikelompokkan ke dalam pos-pos dana sesuai dengan tujuan dan maksud tertentu. Metode akuntansi ini ditujukan sebagai sarana pengawasan terhadap dana tertentu apakah telah dipakai sesuai dengan tujuannya. Persamaan dasar Akuntansi Dana dalam akuntansi dana, adalah sebagai berikut:

$$\text{ASET} = \text{KEWAJIBAN} + \text{EKUITAS DANA}$$

Sedangkan persamaan dasar akuntansi yang digunakan oleh perusahaan yang berfokus mencari laba, yaitu:

$$\text{ASET} = \text{KEWAJIBAN} + \text{EKUITAS}$$

Rumus persamaan dasar akuntansi diatas memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu pada nilai ekuitas perusahaan komersial merupakan kepemilikan oleh pemegang sahamnya. Sedangkan ekuitas dana tidak menunjukkan adanya kepemilikan oleh individu karena dalam entitas sektor publik tidak ada suatu kepemilikan individu.

5.7 AKUNTANSI ANGGARAN.

Akuntansi anggaran merupakan sebuah teknik penyusunan akuntansi yang dibuat oleh entitas sektor publik, terutama pemerintah yang dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangannya memiliki jumlah yang sama dengan total anggarannya. Tujuan khusus dari penerapan teknik ini yaitu untuk melihat apakah penggunaan anggaran sudah sesuai dan dapat dikendalikan serta dipertanggungjawabkan kepatuhannya. Entitas sektor publik memberikan informasi tentang anggaran dan realisasinya menggunakan dua kolom secara bersama-sama. Menurut (Majid, 2019: 89) terdapat beberapa metode dalam teknik pencatatan, yaitu mendokumentasikan sebuah anggaran sebagai sebuah transaksi yang terpisah dan memperlakukan setiap akun anggaran sebagai akun buku besar tersendiri yang setara dengan akun lainnya, menempatkan sebuah transaksi yang terkait dengan anggaran sebagai akun di buku besar pembantu di setiap akun riilnya, membuat anggaran sebagai informasi yang terikat di setiap buku besar.

Terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahwa akuntansi anggaran tidak sama dengan akuntansi keuangan. Akuntansi anggaran lebih kepada perencanaan, sedangkan akuntansi keuangan atau akuntansi sektor publik lebih fokus kepada pembuatan dan pelaporan keuangan (Firdaus dkk, 2006: 74). Meskipun memiliki penyebutan akuntansi anggaran, tetapi teknik pengerjaan berbeda dengan keuangan

karena tidak memenuhi konsep akuntansi sebagai pelaporan. Akuntansi anggaran merupakan bagian dari disiplin administrasi publik dan bukan termasuk keluarga besar ilmu akuntansi (Firdaus dkk., 2006: 74).

5.6. AKUNTANSI KOMITMEN.

Teknik yang digunakan dalam sistem akuntansi komitmen adalah mengakui transaksi ketika pesanan dibuat atau diterima tidak saat kas masuk atau keluar ataupun faktur diterima atau dikirimkan. Teknik ini mengakui pendapatannya pada saat faktur dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama-sama akuntansi kas atau akuntansi akrual dan terkadang hanya dapat menjadi bagian dari struktur akuntansi pokok yang dipakai oleh suatu entitas. Tujuan khusus dari akuntansi komitmen adalah untuk kontrol anggaran, supaya pengelola bisa mengontrol sebuah anggaran, maka penting untuk melihat seberapa banyak anggaran yang sudah dipakai apabila dihitung sesuai dengan pesanan yang telah dikeluarkan.

5.7 AKUNTANSI AKRUAL.

Akuntansi akrual dinilai makin efektif dan efisien dari pada akuntansi kas. Teknik dalam akuntansi berbasis akrual dapat menggambarkan sebuah kerangka yang lengkap terhadap laporan posisi keuangan pemerintah, dapat menyajikan informasi tentang data keuangan secara akurat dan komprehensif, bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah secara efektif, dan menghasilkan data yang penting untuk proses pertimbangan dalam hal ekonomi, sosial, dan politik. Basis akrual yang digunakan sedikit memiliki perbedaan antara proprietary fund (full accrual) dan governmental fund (modified accrual) dikarenakan biaya (expense) dalam proprietary fund dihitung, sedangkan expenditure dipusatkan pada general fund. Beban adalah Biaya atau sumber daya yang dihabiskan dalam rentang waktu akuntansi. Pengeluaran adalah sejumlah kas yang dihabiskan atau akan dihabiskan dalam rentang waktu akuntansi. Karena governmental fund tidak mempunyai sebuah catatan modal dan kewajiban (ditulis/dikelompokkan dalam aset tetap dan kewajiban jangka panjang), expenditure yang diukur, bukan expense. Perbedaan antara akuntansi berbasis kas dengan akuntansi berbasis akrual dapat dilihat sebagai berikut (Yuesti dkk, 2020: 38):

1. Basis Kas: Penerimaan kas – Pembayaran kas = Selisih kas
2. Basis Akrual: Pendapatan (income) – Biaya-biaya = Rugi/laba
3. Pendapatan: Perolehan kas dalam satu rentang waktu akuntansi – saldo awal piutang + saldo akhir piutang.
4. Biaya: kas yang dibelanjakan dalam satu rentang waktu akuntansi – saldo awal utang + saldo akhir utang.

Penerimaan antara kas dan hak untuk mendapatkan kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban untuk membayarkan kas dibedakan dalam pencatatan akuntansi

berbasis akrual. Sehingga, sistem akrual mengakui pendapatan dan biaya ketika didapatkan (earned) atau pada saat terjadi (incurred), bukan saat kas sudah diterima atau dibelanjakan.

5.8 AKUNTANSI KAS.

Penggunaan dari akuntansi kas yaitu mencatat pendapatan saat kas masuk, dan mencatat sebagai pengeluaran saat kas dibelanjakan. Keunggulan dari dasar akuntansi kas adalah menggambarkan pengeluaran yang sebenarnya, konkret dan rasional. Namun, GAAP tidak merekomendasikan penyusunan laporan akuntansi dengan basis kas sebab tidak bisa menggambarkan kapasitas yang sesungguhnya. Dengan dasar kas, tingkat ketepatan dan efisien suatu rencana kegiatan, program, atau aktivitas tidak dapat dinilai dengan baik. Sebagai contoh, penerimaan kas dari transaksi utang akan ditulis sebagai penerimaan (revenue) bukan sebagai utang. Untuk mengoreksi hal tersebut, kebanyakan sistem akuntansi berbasis kas bukan hanya menerima kas saja, juga mengakui aset dan kewajiban yang muncul sebelum terjadi transaksi kas.

5.8 SISTEM PENCATATAN.

Definisi dari Akuntansi Sektor Publik hampir sama dengan Akuntansi Keuangan sektor swasta yaitu mengidentifikasi berbagai peristiwa ekonomi melalui proses pengukuran, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan yang diintegrasikan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Dalam sebuah proses akuntansi terdapat proses pencatatan. Dimana sistem pencatatan dalam akuntansi di bagi menjadi 3 jenis, antara lain:

1. *Single Entry.*

Sistem pencatatan ini dikenal sebagai pencatatan sederhana atau tata buku. Sesuai dengan namanya bahwa setiap transaksi yang berhubungan dengan aliran kas hanya dicatat satu kali pada saat terjadi transaksi yang menyebabkan kas masuk atau kas keluar. Sistem pencatatan *single entry* dilihat dari cara penyusunannya sangat sederhana dan mudah dipahami. Namun demikian sistem ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain mudah terjadinya penyelewengan dana karena tidak dicatat secara runtut, kurang efisien dalam penyusunan laporan, dan sulit untuk dikontrol. Maka dari itu sistem pencatatan ini ditingkatkan menjadi sistem pencatatan *double entry* yang dikenal dengan akuntansi.

2. *Double Entry.*

Sistem pencatatan ini sering disebut sebagai pencatatan tata buku berpasangan yaitu sebuah sistem dimana transaksi keuangan dicatat kedalam 2 akun atau lebih. Sehingga dalam sistem ini mengenal 2 sisi sifat yaitu sisi debit pada sebelah kanan

dan sisi kredit pada sebelah kiri. Setiap pencatatan transaksi harus seimbang sesuai dengan rumus persamaan dasar akuntansinya seperti yang tercermin dibawah ini.

$$\text{ASET} = \text{KEWAJIBAN} + \text{EKUITAS}$$

atau untuk entitas sektor publik

$$\text{ASET} + \text{BELANJA} = \text{KEWAJIBAN} + \text{EKUITAS DANA}$$

Sistem pencatatan *double entry* pada entitas sektor publik sama dengan entitas swasta dimana transaksi yang menyebabkan kelompok aset bertambah akan dicatat pada sisi debit dan transaksi yang menyebabkan kelompok aset berkurang dicatat pada sisi kredit begitu pula dengan belanja pemerintah. Sementara untuk kelompok di sisi kanan seperti kewajiban, ekuitas dana, dan pendapatan dicatat pada sisi kredit bila terdapat transaksi yang mengakibatkan bertambah dan dicatat di sisi debit bila menyebabkan transaksi berkurang.

3. Triple Entry.

Pada dasarnya sistem pencatatan ini sama dengan sistem pencatatan *double entry* hanya ditambah dengan pencatatan buku anggaran. Penggunaan sistem ini tetap mencatat menggunakan *double entry* pada entitas pemerintahan, tetapi pejabat penatausahaan keuangan (PPK), satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) maupun staf keuangan atau satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) ikut mendokumentasikan transaksi tersebut pada buku anggaran, yang nantinya pencatatan itu berdampak pada saldo anggaran. Oleh karena itu, saat teknik prosedur pencatatan *double entry* dikerjakan, maka sub bagian pembukuan (bagian keuangan) pemerintah daerah juga mendokumentasikan transaksi tersebut pada buku anggaran sehingga pencatatan akan berdampak pada sisi anggaran.

5.9 FOKUS PENGUKURAN.

Akuntansi keuangan sektor publik adalah bagian dari ilmu akuntansi yang didalamnya juga terdapat proses akuntansi seperti identifikasi, pengukuran, pencatatan dan penyajian peristiwa-peristiwa ekonomi yang ada di entitas sektor publik. Proses identifikasi adalah bagian dari proses akuntansi yang mengelompokkan dan membedakan peristiwa ekonomi yang dapat mengubah data keuangan dan yang tidak. Peristiwa ekonomi yang dapat mengubah data keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan data yang merubah aliran kas dan harta sebuah entitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, pengukuran adalah sebuah prosedur pengakuan nilai uang dan menempatkan setiap akun dalam laporan keuangan. Pengukuran rekening-rekening dalam laporan keuangan memakai pandangan historis atau sebesar nilai wajarnya. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sejumlah nilai wajar pada kompensasi yang diberikan untuk

mendapatkan harta/aktiva tersebut. Kewajiban didokumentasikan sejumlah nilai wajar sumber daya ekonomi yang dipakai pemerintah dalam pemenuhan Utang tersebut atau nilai nominal. Pengukuran akun –akun pada laporan keuangan entitas publik memakai mata uang rupiah. Kegiatan yang memakai mata uang asing harus ditransformasikan terlebih dahulu dan kemudian dinyatakan dalam mata uang rupiah.

5.9.1. Basis Akuntansi.

Salah satu rangkaian terpenting dalam proses pencatatan akuntansi yaitu permasalahan mengenai pengakuan (recognition). Sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010, pengakuan pada proses pencatatan akuntansi adalah rangkaian pemenuhan penetapan standar dari suatu kejadian ataupun peristiwa saat melakukan pencatatan proses akuntansi kemudian bakal menjadi sebuah potongan yang menyempurnakan unsur dari kelompok aktiva, hutang, ekuitas dana, penerimaan, belanja dan pembiayaan, yang terekam dalam pengakuan sehingga dapat ditarik kesimpulan kapan sebuah transaksi dapat dicatat. Maka dari itu, dalam menentukan pencatatan sebuah transaksi keuangan tersebut, digunakan basis/dasar pencatatan akuntansi. Kumpulan dari berbagai standar akuntansi yang telah ditetapkan mengenai kapan sebuah transaksi ataupun peristiwa akan berdampak pada perubahan keuangan harus diakui dengan tujuan untuk pembuatan laporan keuangan merupakan definisi dari basis akuntansi. Secara umum, basis akuntansi dibagi menjadi dua jenis yaitu basis kas dan basis akrual. Namun, basis akuntansi pada entitas sektor publik, dalam hal ini pemerintah, mencakup basis kas, basis kas modifikasian, basis kas menuju akrual dan basis akrual. Jenis –jenis basis akuntansi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Basis Kas.

Pada jenis basis yang pertama yaitu basis kas hanya mengakui aliran kas yang diterima dan aliran kas yang dibayarkan. Basis kas ini menentukan bahwa pengakuan terhadap sebuah transaksi ekonomi hanya dilaksanakan sebatas apabila transaksi itu memunculkan yang menyebabkan terjadinya perubahan kas. Namun bila suatu transaksi tidak atau belum merubah posisi kas maka transaksi tersebut tidak perlu dicatat pada laporan akuntansi. Basis kas dipakai pada berbagai entitas sektor publik. Keutamaan dari penggunaan basis kas yaitu menggambarkan berbagai pengeluaran yang aktual, riil dan objektif. Namun penggunaan dari basis kas ini, suatu kegiatan tidak dapat diukur dengan baik secara efektif dan efisien.. Oleh karena itu, dari basis kas munculah basis kas modifikasian di mana entitas tidak hanya mengakui kas saja, akan tetapi juga aktiva dan kewajiban yang muncul.

2. Basis Kas Modifikasian.

Menurut butir (12) dan (13) Lampiran XXIX (tentang Kebijakan Akuntansi) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa basis kas modifikasian (modified cash basis) merupakan campuran pengakuan basis kas dengan basis

akrual. Sebuah transaksi penerimaan ataupun pembayaran kas didokumentasikan pada saat uang masuk atau dibayar sedangkan di akhir kurun waktu akuntansi dibuat proses penyesuaian untuk mengakui transaksi dan peristiwa dalam periode berjalan walaupun pemasukan atau pengeluaran kas dari transaksi dan peristiwa yang dimaksud belum terjadi. Oleh karena itu, penggunaan basis akuntansi mengharuskan bendahara pengeluaran mendokumentasikan transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan mengerjakan penyesuaian pada akhir periode anggaran berdasarkan basis akrual.

3. Basis Kas Menuju Akrual.

Pada saat penerimaan, belanja, dan pembiayaan direkam sebagai basis kas, sedangkan aktiva, kewajiban dan ekuitas dana direkam dengan basis akrual maka hal ini merupakan definisi basis kas menuju akrual menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh karena itu, pada PP No. 24 Tahun 2005, laporan keuangan entitas publik khususnya pemerintahan hanya berupa laporan realisasi anggaran, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran mempunyai arti bahwa pendapatan diakui pada saat kas masuk dan belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas. Sedangkan basis akrual untuk laporan posisi keuangan menyebutkan bahwa aktiva, hutang dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Governmental Accounting Standards Board (GASB) merekomendasikan penerapan basis akuntansi yang tidak murni berdasarkan basis kas dan basis akrual.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, Ahmad, dkk. 2006. Akuntansi Biaya. Jakarta: Salemba Empat.
- Jamaluddin, Majid. 2019. Akuntansi Sektor Publik. Sulawesi Selatan: Pusaka Almailda.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: andi Yogyakarta
- _____. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddi. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Sabeni, Arifin dan Ghozali, I.. 2008. Pokok- Pokok Akuntansi Pemerintah. BPFE: Yogyakarta.
- Yuesti, Anik, dkk. 2020. Akuntansi Sektor Publik. Bali: CV. Noah Aletheia.

PROFIL PENULIS



Umi Rahma Dhany

Penulis lahir bertempat di Probolinggo, 12 April 1989. Penulis mulai tertarik dengan ilmu akuntansi pada tahun 2004 saat mulai masuk Sekolah Menengah Atas. Hal tersebut kemudian dilanjutkan saat lulus dari SMA Katolik Mater Dei Probolinggo pada tahun 2007 untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi Strata 1 di prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang pada tahun 2011. Pada tahun berikutnya, tepatnya tahun 2012 penulis melanjutkan studi Strata 2 di prodi Pendidikan Ekonomi program pasca sarjana Universitas Negeri Malang dan berhasil lulus pada tahun 2014. Tahun 2021, Penulis sedang melanjutkan studi Doktorat di prodi Ilmu Ekonomi Universitas Merdeka Malang.

Penulis bekerja sebagai dosen di lingkungan Universitas Panca Marga Probolinggo mulai tahun 2013 sampai dengan sekarang. Saat ini penulis menjadi Ketua Badan Gugus Kendali Mutu tingkat Fakultas. Penulis memiliki kepakaran pada bidang ilmu akuntansi dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis berhasil mendapatkan sertifikat dosen profesional ditahun 2017. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi.

Email Penulis: rahmadhany@upm.ac.id

DATA PENGIRIMAN DAN PENGAJUAN HKI



1. Untuk Pengiriman buku cetak, mohon isi data berikut

Nama Penerima : Umi Rahma Dhany

Alamat (lengkap): Jl. Raya Dringu Timur Kantor Pos Dringu, desa Parsian,
Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo

HP. Aktif : 082244787274

2. Untuk pengajuan HKI, mohon mengisi data berikut sesuai yang tertera pada KTP:

<p>Nama Lengkap:</p> <p>Alamat:, RT/RW: .../....</p> <p>Kel/Desa:, Kec.:</p> <p>Kab./Kota:</p> <p>Provinsi:</p> <p>Kode Pos:</p> <p>Email:</p> <p>Hp. Aktif:</p>	<p>Nama Lengkap: Umi Rahma Dhany</p> <p>Alamat: Jl Raya Dringu Timur Kantor Pos Kel/Desa: Desa Randu Putih, Kec.: Dringu</p> <p>Kab./Kota: Kabupaten Probolinggo</p> <p>Provinsi: Jawa Timur</p> <p>Kode Pos: 67271</p> <p>Email: rahmadhany@upm.ac.id</p> <p>Hp. Aktif: 082244787274</p>
<p>FOTO KTP (bidang data saja tidak perlu bolak-balik)</p>	
<p>TTD DIATAS MATERAI</p> <p style="color: red;">Pastikan Bertandatangan diatas MATERAI 10.000 menggunakan kertas putih bersih (tanpa nama dibawahnya) dan warna pulpen yang jelas (hitam atau biru)</p>	

Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	agusselamet.wordpress.com Internet Source	2%
2	tnurudin.blogspot.com Internet Source	1%
3	aparatpengawasinternpemerintah.blogspot.com Internet Source	1%
4	specialpengetahuan.blogspot.com Internet Source	1%
5	akuntansikampus.blogspot.com Internet Source	1%
6	jurnal.unej.ac.id Internet Source	1%
7	repository.upstegal.ac.id Internet Source	1%
8	skp1cilacap-ppid.pertanian.go.id Internet Source	1%
9	Wiwin Kurniasari. "Transparansi Pengelolaan Masjid dengan Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi	1%

Keuangan (PSAK 45)", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2011

Publication

10	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	1 %
11	Pipit Rosita Andarsari. "Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid)", Ekonika : Jurnal ekonomi universitas kadiri, 2017 Publication	1 %
12	Submitted to Trisakti University Student Paper	1 %
13	adoc.pub Internet Source	1 %
14	kaumauakuada.blogspot.com Internet Source	1 %
15	Submitted to Ajou University Graduate School Student Paper	<1 %
16	jdih.malangkab.go.id Internet Source	<1 %
17	edmalgunawan.wordpress.com Internet Source	<1 %
18	prezi.com Internet Source	<1 %
19	pt.slideshare.net Internet Source	

<1 %

20

eprints.umg.ac.id

Internet Source

<1 %

21

journal.ugm.ac.id

Internet Source

<1 %

22

ejurnal.poltekpos.ac.id

Internet Source

<1 %

23

mafiadoc.com

Internet Source

<1 %

24

terrasolusi.net

Internet Source

<1 %

25

www.akuntansi.in

Internet Source

<1 %

26

Submitted to Badan PPSDM Kesehatan
Kementerian Kesehatan

Student Paper

<1 %

27

download.garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

<1 %

28

Calvin Liawan. "Analisis Penggunaan dana
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada
Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota
sorong", Jurnal Pitis AKP, 2018

Publication

<1 %

eprints.unpak.ac.id

30

Sepang Gisella Monica, David Paul Elia Saerang, Sonny Pangerapan. "PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MANADO", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017

Publication

<1 %

31

nendamarliani.blogspot.com

Internet Source

<1 %

32

www.infoakuntan.com

Internet Source

<1 %

33

Dedy Kurniawan Kiay Demak, Jullie J. Sondakh, Steven Tangkuman. "PENERAPAN PP NO.71 TAHUN 2010 DALAM PELAPORAN AKUNTANSI BELANJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2014", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2015

Publication

<1 %

34

Dini Lestari dan Sri Rahayu. "PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) BERBASIS AKRUAL DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN INTERNAL DAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

<1 %

35

Vania Annissa Holle, Agustinus Salle, Mariolin Sanggenafa. "PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua)", JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH, 2020

<1 %

Publication

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On